

# REFERENSI

No. 03/ref.PKA/VI/2021

**PETA POLITIK KEAMANAN DAN  
PEREKONOMIAN NASIONAL SERTA DAERAH**

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
BADAN KEAHLIAN - SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**



# Peta Politik Keamanan dan Perekonomian Nasional serta Daerah

Riza Aditya Syafri dan Tio Riyono

## I. Pendahuluan

Politik dan keamanan menjadi salah satu unsur penting dalam suatu negara. Politik di definisikan sebagai segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat (Deliar Noer, 1983: 6). Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Politik merupakan ilmu mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan.

Keamanan sendiri merupakan sebuah konsep yang multi interpretatif. Keamanan tidak hanya terbatas pada pertahanan serta perang, namun juga meliputi perpaduan antara ancaman militer dan non militer. Keamanan nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan negara. Keamanan nasional berkembang mencakup pertahanan negara, keamanan negara, keamanan ketertiban masyarakat, dan keamanan insani. (Lemhanas, 2016).

Politik dan keamanan sendiri memiliki keterkaitan erat terhadap pembangunan dan perekonomian dalam suatu negara. Mankiw (2000) mengungkapkan bahwa perekonomian sebuah negara tidak akan terlepas dari peranan faktor politik. Kondisi politik yang aman dan stabil akan berpengaruh positif terhadap perekonomian. Situasi politik yang stabil akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, dan situasi seperti ini merangsang pertumbuhan ekonomi, terbukanya akses untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif, sehingga produksi dapat ditingkatkan (Tarmidi, 2009).

Berdasarkan beberapa *literature review* tersebut terlihat bahwa politik dan keamanan memiliki korelasi yang positif terhadap perekonomian. Sehingga, dalam referensi APBN ini ingin melihat dan menampilkan bagaimana posisi indikator politik dan keamanan Indonesia serta indikator perekonomian pada level provinsi. Adapun beberapa indikator yang akan digunakan sebagaimana tertera pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Kerangka Indikator yang Digunakan

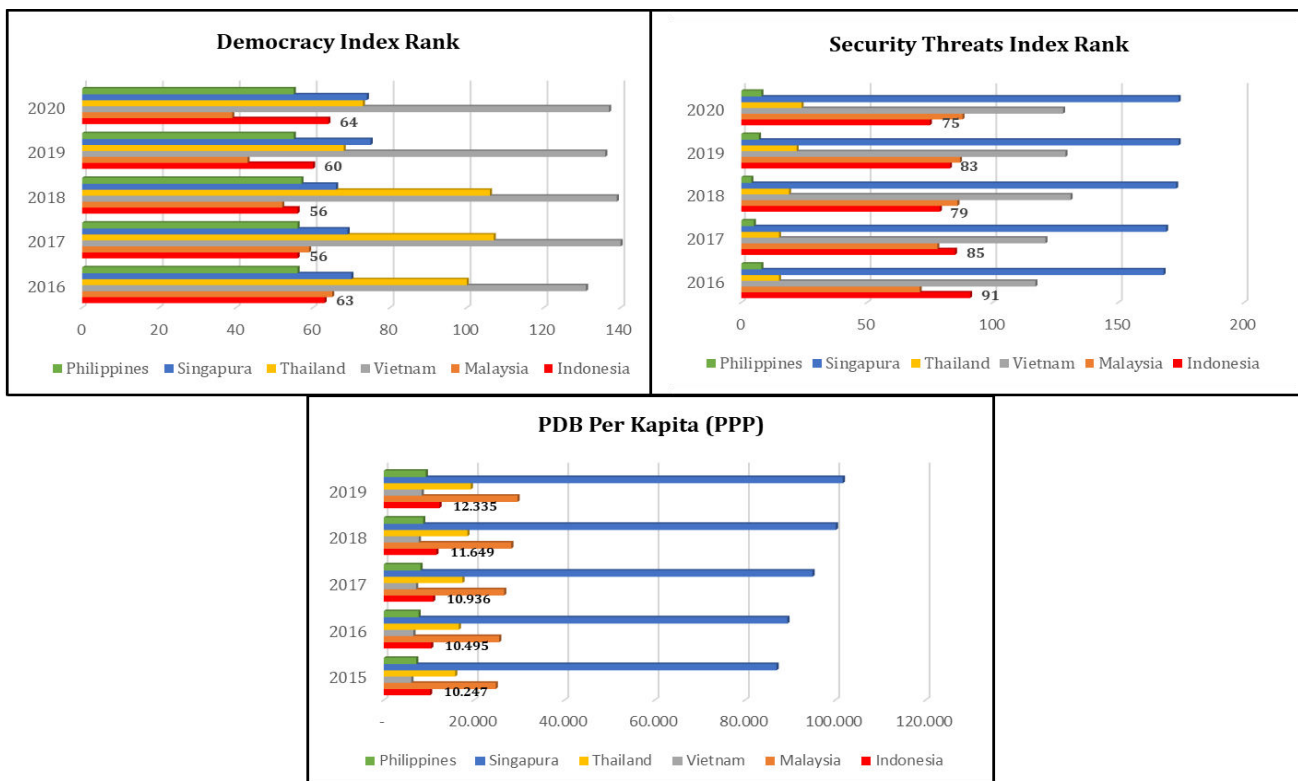
<b>Indikator Politik dan Keamanan</b>	
<b>Indikator Politik dan Keamanan Internasional</b>	<b>Indikator Politik dan Keamanan Nasional</b>
<i>Democracy Index</i>	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
<i>Security Threats Index</i>	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (%) Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan
<b>Indikator Perekonomian</b>	
Total Investasi (Miliar Rupiah)	Penanaman Modal Asing (PMA)
	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	
PDRB Per Kapita (Miliar Rupiah)	
Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)	

Sumber: BPS, DJPK, TheGlobalEconomy, World Bank, EIU, Diolah.

## II. Gambaran Posisi Politik dan Keamanan Indonesia di Internasional

**Democracy Index** merupakan indeks yang dirilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU) yang memberikan gambaran keadaan politik dan demokrasi dunia di 165 negara. Adapun 5 kategori dalam *democracy index* didasarkan pada proses pemilu dan pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, dan budaya politik. Sementara **security threats index** merupakan salah satu indikator yang dirilis dalam *Fragile States Index*, yang menggambarkan kondisi keamanan suatu negara baik akibat faktor eksternal, maupun faktor internal di dalam negeri (mendekati peringkat 1 semakin rendah keamanannya).

**Gambar 1.** Posisi *Democracy Index*, *Security Threats Index*, dan PDB Per Kapita Indonesia



dibandingkan negara *peers*

Sumber: TheGlobalEconomy, EIU, World Bank, diolah.

Berdasarkan gambar 1 diatas, memperlihatkan bahwa dari indikator *democracy index*, posisi Indonesia lebih baik dari Thailand, Singapura, dan Vietnam. Sementara pada indikator *security threats index*, posisi Indonesia lebih baik dari Thailand dan Philippines. Dari gambar 1 diatas juga bisa dilihat, bahwa Singapura dan Vietnam, walaupun memiliki indeks demokrasi yang rendah, namun memiliki keamanan yang cenderung baik. Selanjutnya jika dilihat dari indikator perekonomiannya, PDB per kapita Indonesia berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand, dan hanya lebih baik dibandingkan Vietnam dan Philippines. Dari Gambar 1 di atas juga bisa terlihat, bahwa Singapura yang memiliki indeks demokrasi lebih rendah dari Indonesia

(peringkat 74 dari 167 negara), namun memiliki keamanan yang sangat baik (peringkat 174 dari 176 negara), dapat memiliki PDB per kapita yang sangat tinggi.

### III. Gambaran Indikator Politik dan Keamanan serta Indikator Ekonomi Nasional

**Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)** merupakan indeks yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang merepresentasikan gambaran kondisi politik di Indonesia, dan merupakan alat untuk menakar perkembangan demokrasi di tingkat provinsi. Sementara **Persentase Penyelesaian Tindak Pidana** dan **Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan** merupakan variabel yang dianggap merepresentasikan kondisi keamanan nasional dan tingkat provinsi, yang dihimpun oleh BPS melalui Polri.

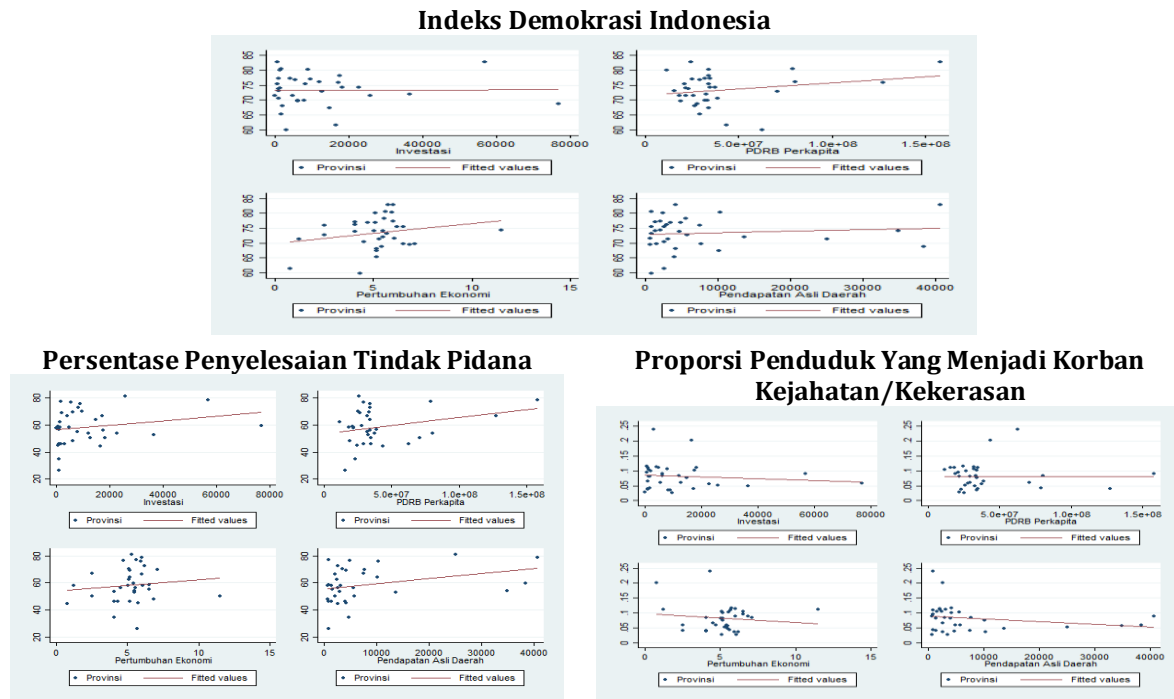
Sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan, bahwa indikator politik dan keamanan memiliki keterkaitan terhadap perekonomian. Hal itu sejalan dengan penelitian empiris yang dilakukan Esthiningrum (2017) yang menyebutkan bahwa IDI secara agregat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Artinya, semakin baik demokrasi di tingkat regional, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Demikian pula terkait indikator keamanan, dalam teori perubahan struktural yang dikemukakan Chenery (1979), menyebutkan bahwa meningkatnya stabilitas keamanan sebagai hasil transformasi proses sosial/pertahanan-keamanan, akan meningkatkan stabilitas makroekonomi. Hasil kajian empiris Saputro (2019) juga menyebutkan bahwa stabilitas keamanan dan pertumbuhan industri strategis berpengaruh secara simultan terhadap stabilitas makroekonomi.

Dari beberapa literatur diatas memperlihatkan bahwa baik IDI maupun indikator keamanan memiliki pengaruh terhadap perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari indikator makroekonomi. Ketika terjadi stabilitas pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, hal tersebut diharapkan akan mendorong peningkatan PDRB per kapita di wilayah tersebut. Selain itu, investasi merupakan salah satu komponen yang membentuk pendapatan nasional/daerah (PDB/PDRB) yang kemudian dihitung pertumbuhannya dan disebut pertumbuhan ekonomi. Sehingga, pertumbuhan ekonomi juga terkait dengan investasi di suatu wilayah. Investasi di suatu daerah yang semakin besar juga akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di wilayah tersebut, sebagai akibat meningkatnya aktivitas perekonomian.

Sejalan dengan *literature review* yang telah disebutkan di atas, dengan menggunakan data yang diolah melalui Stata terhadap indikator politik keamanan dan perekonomian yang digunakan dalam referensi ini, didapatkan hasil sebagai berikut: (1) IDI memiliki kecenderungan berpengaruh positif terhadap investasi, PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, maupun PAD. Hal tersebut dapat dilihat dari *slope* (garis merah pada Gambar 2) yang positif. Artinya, semakin tinggi IDI semakin baik indikator perekonomiannya; (2) Persentase penyelesaian tindak pidana memiliki kecenderungan berpengaruh positif terhadap investasi, PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, maupun PAD. Artinya semakin tinggi penyelesaian tindak pidana, semakin baik

indikator perekonomiannya; (3) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan/kekerasan cenderung berpengaruh negatif terhadap investasi, PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, maupun PAD. Artinya, semakin tinggi tingkat kejahatan/kekerasan di suatu wilayah, semakin rendah indikator perekonomiannya.

**Gambar 2.** Scatterplot Hubungan antara Politik Keamanan dan Ekonomi



Sumber: BPS, DJPK, diolah.

Berikutnya, dapat dilihat provinsi-provinsi dengan indikator politik keamanan serta perekonomian, baik yang tertinggi maupun terendah secara nasional berdasarkan data rata-rata dalam 5 tahun terakhir.

**Tabel 2.** Provinsi dengan Indikator Politik Keamanan dan Perekonomian Tertinggi dan Terendah Berdasarkan Data Rata-Rata Tahunan Dalam 5 Tahun Terakhir (2015-2019)

Indikator Politik dan Keamanan			
2 Provinsi dengan IDI tertinggi		2 Provinsi dengan IDI terendah	
(1) DKI Jakarta [82,85]		(34) Papua Barat [59,80]	
(2) DI Yogyakarta [82,77]		(33) Papua [61,47]	
Penyelesaian tindak pidana tertinggi (%)	Penyelesaian tindak pidana terendah (%)	Proporsi korban kekerasan terendah (%)	Proporsi korban kekerasan tertinggi (%)
(1) Jawa Tengah [80,86%]	(34) Maluku [26,91%]	(34) Kalimantan Barat [0,03%]	(1) Papua Barat [0,24%]
(2) DKI Jakarta [80,37%]	(33) Aceh [35,05]	(33) Sulawesi Barat [0,03%]	(2) Papua [0,20%]
Indikator Perekonomian			
Total investasi tertinggi (Miliar Rupiah)	Total investasi terendah (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan ekonomi tertinggi (%)	Pertumbuhan ekonomi terendah (%)
(1) Jawa Barat [114.279]	(34) Sulawesi Barat [1.427]	(1) Sulawesi Tengah [11,50%]	(34) Papua [0,81%]
(2) DKI Jakarta [94.337]	(33) Maluku [1.464]	(2) Sulawesi Selatan [7,14%]	(33) Nusa Tenggara Barat [1,24%]

PDRB per kapita tertinggi (Juta Rupiah)	PDRB per kapita terendah (Juta Rupiah)	PAD tertinggi (Miliar Rupiah)	PAD terendah (Miliar Rupiah)
(1) DKI Jakarta [158,01]	(34) Nusa Tenggara Timur [11,88]	(1) DKI Jakarta [40.702]	(34) Sulawesi Barat [686]
(2) Kalimantan Timur [127,75]	(33) Maluku [15,97]	(2) Jawa Barat [38.529]	(33) Maluku Utara [772]

\*[]=Peringkat Nasional

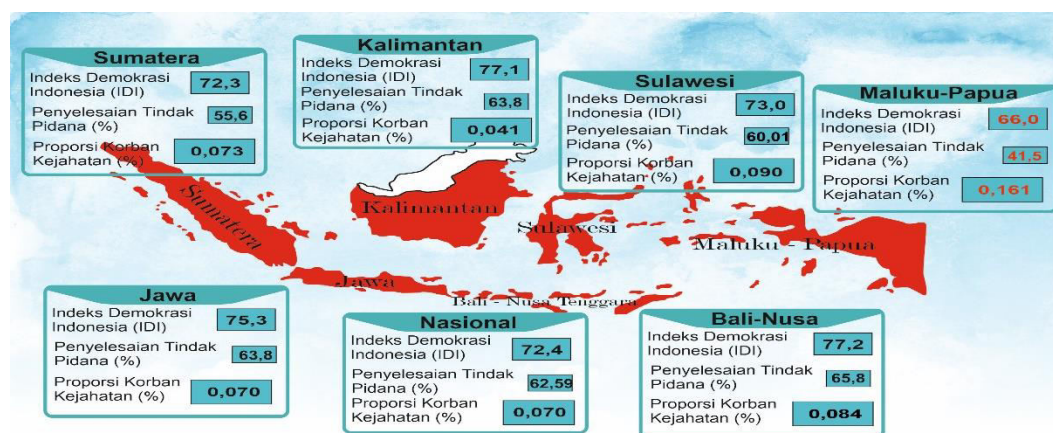
\*\*[]=nilai indikator

Sumber: BPS, DJPK, diolah.

#### IV. Gambaran Indikator Politik dan Keamanan serta Indikator Ekonomi per Region

Dilihat dari rata-rata perkembangan indikator politik dan keamanan secara regional (Gambar 3) dalam 5 tahun terakhir, terlihat bahwa region **Kalimantan** memiliki kondisi politik dan keamanan paling tinggi dibuktikan dengan skor tertinggi ke-2 untuk indikator IDI, tertinggi untuk persentase penyelesaian tindak pidana, serta terendah untuk proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan/kekerasan. Selain itu, region Jawa dan Bali-Nusa juga melengkapi 3 besar region dengan indikator politik keamanan terbaik dibandingkan region lainnya. Sedangkan region **Maluku-Papua** memiliki kondisi politik dan keamanan paling rendah, yang dibuktikan dengan skor terendah untuk indikator IDI, terendah untuk persentase penyelesaian tindak pidana, serta tertinggi untuk proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan.

**Gambar 3.** Perkembangan indikator Politik dan Keamanan Indonesia dan Regional dalam rata-



rata 5 tahun terakhir (2015-2019)

Sumber: BPS, diolah.

Sementara dilihat dari perkembangan indikator perekonomiannya, region Jawa menjadi region dengan rata-rata kondisi perekonomian yang tertinggi dibandingkan region lainnya. Sementara region Maluku-Papua, cenderung menjadi region dengan rata-rata perkembangan indikator perekonomian yang terendah dibandingkan region lainnya. Sementara dilihat per indikatornya, region Jawa menjadi region dengan rata-rata total investasi tertinggi dan rata-rata PAD tertinggi, region Sulawesi menjadi region dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi, dan region Kalimantan menjadi rata-rata region dengan PDRB per kapita tertinggi.

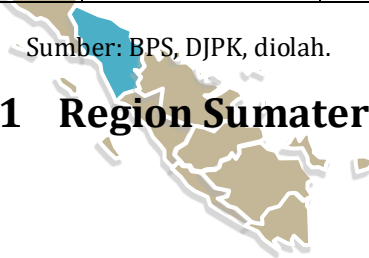
**Tabel 3.** Indikator Perekonomian Secara Regional rata-rata 5 tahun terakhir (2015-2019)

Region	Total Investasi (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	Rata-Rata PAD (Miliar Rupiah)
Sumatera	(3) 12.072	(4) 4,54	(3) 39,49	(3) 4.341
Jawa	(1) 62.533	(2) 5,59	(2) 51,30	(1) 26.211
Bali-Nusa Tenggara	(5) 7.611	(6) 4,11	(6) 21,61	(2) 5.398
Kalimantan	(2) 16.237	(3) 4,84	(1) 59,18	(4) 3.926
Sulawesi	(4) 9.108	(1) 7,30	(5) 29,31	(5) 2.549
Maluku-Papua	(6) 7.328	(5) 4,43	(4) 35,40	(6) 1.310

\*()= Peringkat berdasarkan regional

Sumber: BPS, DJPK, diolah.

## 4.1 Region Sumatera



Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) region Sumatera masih berada di atas rata-rata nasional. Terdapat 5 provinsi yang berada di atas rata-rata. IDI tertinggi dimiliki oleh Sumatera Selatan. Sedangkan provinsi yang masih di bawah rata-rata sebanyak 5 provinsi. Dalam hal ini, IDI region Sumatera perlu menjadi perhatian khusus, karena 3 dari 5 provinsi dengan IDI terendah secara nasional ada di region Sumatera, diantaranya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Lampung.

Indikator Penyelesaian tindak pidana, region Sumatera mayoritas berada di bawah rata-rata nasional. Hanya 4 provinsi yang berada di atas rata-rata nasional yaitu Lampung, Sumatera Utara, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sedangkan 6 sisanya masih berada di bawah rata-rata, yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.

Jika dilihat berdasarkan proporsi korban kejahatan kekerasan, region Sumatera memiliki angka yang cukup rendah. Terdapat 6 provinsi di bawah rata-rata nasional. Namun terdapat 4 provinsi memiliki angka tinggi antara lain Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, dan Bengkulu.

**Tabel 4.** Perkembangan Indikator Politik Keamanan dan Perekonomian Per Provinsi di

Indikator	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Penyelesaian Tindak Pidana (%)	Proporsi korban kejahatan Kekerasan (%)	Total Investasi (Miliar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	Pendapatan Asli Daerah (Miliar Rupiah)
<b>Provinsi</b>							
Aceh	(18) 73,83	(33) 35,05	(30) 0,04	(29) 3.473	(30) 4,05	(27) 23,46	(13) 4.852
Sumatera Utara	(31) 67,29	(11) 66,35	(19) 0,08	(9) 24.671	(21) 5,17	(13) 34,26	(7) 10.146
Sumatera Barat	(32) 65,22	(30) 46,25	(18) 0,08	(24) 4.298	(20) 5,18	(21) 29,34	(16) 4.094
Riau	(20) 72,79	(26) 52,09	(21) 0,06	(8) 25.427	(32) 2,50	(5) 70,78	(10) 5.829
Jambi	(25) 70,43	(17) 59,60	(20) 0,07	(23) 4.665	(26) 4,51	(8) 38,90	(20) 2.617
Sumatera Selatan	(6) 78,18	(16) 59,87	(10) 0,10	(7) 28.489	(14) 5,56	(15) 34,24	(11) 5.673
Bengkulu	(17) 74,01	(19) 58,84	(17) 0,08	(26) 3.813	(24) 5,04	(29) 21,77	(28) 1.390
Lampung	(30) 68,04	(8) 71,00	(11) 0,10	(21) 7.861	(19) 5,20	(23) 26,69	(14) 4.309
Bangka Belitung	(8) 77,12	(25) 52,22	(29) 0,04	(31) 3.363	(28) 4,08	(10) 34,91	(27) 1.480
Kep. Riau	(11) 76,05	(24) 54,57	(15) 0,08	(14) 14.664	(29) 4,06	(3) 80,59	(19) 3.018
<b>Rata-Rata Nasional</b>	<b>72,47</b>	<b>62,59</b>	<b>0,07</b>	<b>683.899</b>	<b>5,2</b>	<b>37,93</b>	<b>-</b>



## Region Sumatera Berdasarkan Data Rata-Rata dalam 5 Tahun Terakhir (2015-2019)

\*()=Peringkat Nasional

Sumber: BPS, DJPK, diolah.



Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) region Jawa sangat tinggi. Terdapat dua provinsi tertinggi secara nasional, yaitu DKI Jakarta dan DI Yogyakarta masing-masing sebesar 82,85 dan 82,77. Sedangkan untuk angka IDI terendah yaitu Jawa Barat sebesar 68,65 berada di urutan ke-29 secara nasional.

Untuk indikator penyelesaian tindak pidana, region Jawa memiliki dua provinsi dengan angka tertinggi secara nasional, yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta masing-masing sebesar 80,86% dan 80,37%. Namun DI Yogyakarta memiliki angka yang sangat rendah, berada pada urutan ke-31 dari 34 provinsi dengan skor sebesar 46,18%.

Jika dilihat berdasarkan proporsi korban kejahatan/kekerasan, angka tertinggi ditempati oleh DI Yogyakarta yang menempati urutan ke-3 sebesar 0,12%. Selebihnya, mayoritas memiliki angka yang sangat rendah, seperti Banten (0,03%), Jawa Tengah (0,06%), Jawa Timur (0,06%), Jawa Barat (0,06%), dan DKI Jakarta (0,09%).

**Gambar 4.** Perkembangan Indikator Politik Keamanan dan Perekonomian Per Provinsi di Region Jawa Berdasarkan Data Rata-Rata dalam 5 Tahun Terakhir (2015-2019)



\*()=Peringkat Nasional  
 \*\*[]=nilai indikator

Sumber: BPS, DJPK, diolah.



### 4.3 Region Bali-Nusa

Bali menjadi provinsi dengan IDI tertinggi di region Bali-Nusa dan secara nasional berada pada peringkat ke-4 dengan angka sebesar 80,27. Kemudian diikuti dengan Nusa Tenggara Timur yang juga secara nasional menjadi peringkat ke-5. Namun berbeda untuk Nusa Tenggara Barat yang berada pada peringkat ke-23 secara nasional.

Kemudian apabila dilihat berdasarkan indikator penyelesaian tindak pidana, Bali tetap menempati peringkat pertama di region Bali-Nusa, diikuti dengan Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

Sebaliknya, proporsi korban kejahatan/kekerasan tertinggi di region Bali-Nusa yaitu Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan kemudian Bali. Namun kondisi tersebut sangat timpang mengingat Bali dengan angka 0,04%, kemudian untuk Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebesar 0,11% dan 0,10%.

**Gambar 5.** Perkembangan Indikator Politik Keamanan dan Perekonomian Per Provinsi di



## Region Bali-Nusa Berdasarkan Data Rata-Rata dalam 5 Tahun Terakhir (2015-2019)

\*()=Peringkat Nasional

\*\*[]=nilai indikator

Sumber: BPS, DJPK, diolah.



Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) region Kalimantan termasuk region tertinggi. Seluruh provinsi di region Kalimantan berada di atas rata-rata secara nasional. Provinsi tersebut diurutkan dari yang tertinggi diantaranya Kalimantan Utara (80,54), Kalimantan Barat (76,92), Kalimantan Selatan (76,77), Kalimantan Timur (75,86), dan Kalimantan Tengah (75,36).

Hal yang sama juga untuk indikator penyelesaian tindak pidana, seluruh provinsi di region Kalimantan berada di atas rata-rata secara nasional. Provinsi tersebut diurutkan dari yang tertinggi diantaranya Kalimantan Selatan (77,96), Kalimantan Utara (77,16), Kalimantan Barat (73,41), Kalimantan Tengah (72,85), dan Kalimantan Timur (69,49).

Jika dilihat berdasarkan proporsi korban kejahatan/kekerasan, seluruh provinsi di region Kalimantan berada lebih rendah dibandingkan rata-rata secara nasional. Provinsi tersebut diurutkan dari yang terendah diantaranya Kalimantan Barat (0,03%), Kalimantan Tengah (0,04%), Kalimantan Timur (0,04%), Kalimantan Utara (0,04%), dan Kalimantan Selatan (0,06%).

**Gambar 6.** Perkembangan Indikator Politik Keamanan dan Perekonomian Per Provinsi di Region Kalimantan Berdasarkan Data Rata-Rata dalam 5 Tahun Terakhir (2015-2019)



\*()=Peringkat Nasional

\*\*[]=nilai indikator

Sumber: BPS, DJPK, diolah.

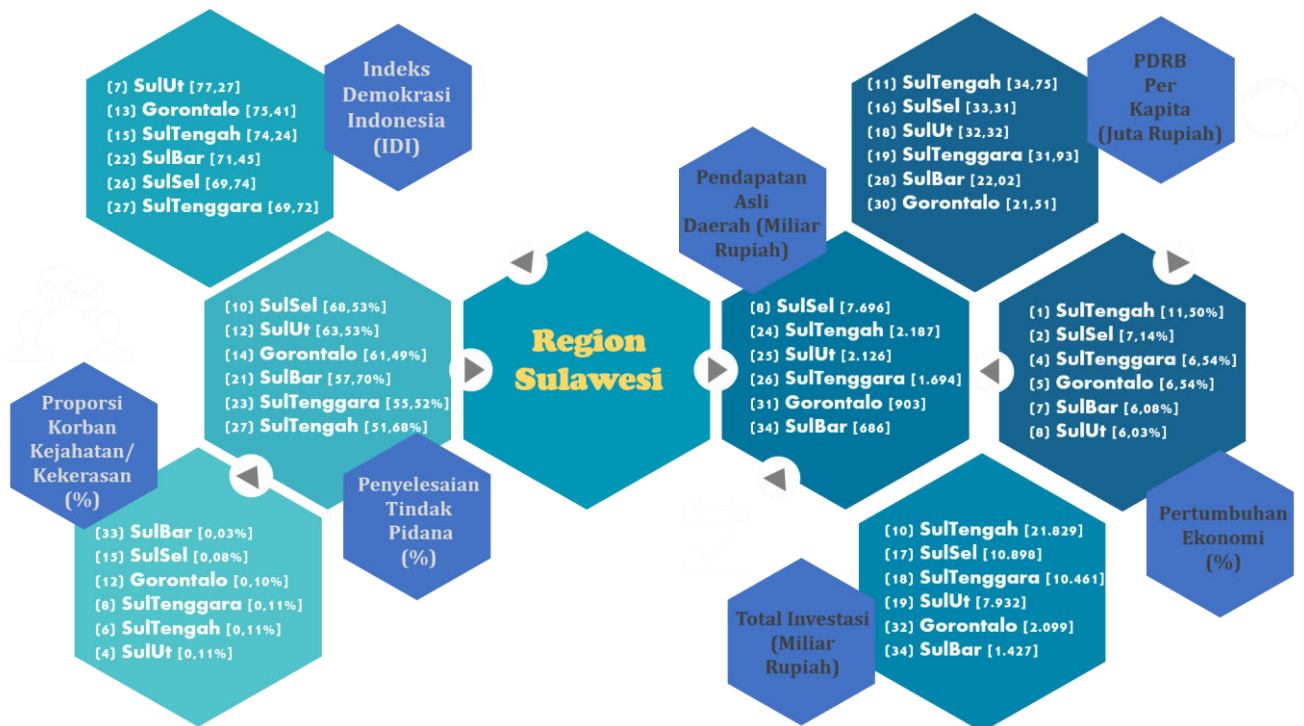
## 4.5 Region Sulawesi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) region Sulawesi tertinggi yaitu Sulawesi Utara sebesar 77,27 dan termasuk ke dalam peringkat 7 tertinggi secara nasional. Di sisi lain, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah termasuk ke dalam provinsi terendah dengan peringkat nasional 27 dan 26.

Kemudian untuk indikator penyelesaian tindak pidana tertinggi yaitu Sulawesi Selatan sebesar 68,53%. Provinsi terendah yaitu Sulawesi Tengah sebesar 51,68%. Secara nasional, Sulawesi Selatan berada di peringkat ke-10 sedangkan Sulawesi Tengah peringkat ke-27

Jika dilihat berdasarkan proporsi korban kejahatan kekerasan, provinsi tertinggi yaitu Sulawesi Utara sebesar 0,11% dengan peringkat ke-4 secara nasional. Sedangkan Sulawesi Barat menjadi 2 provinsi terendah sebesar 0,03% secara nasional.

**Gambar 7.** Perkembangan Indikator Politik Keamanan dan Perekonomian Per Provinsi di



Region Sulawesi Berdasarkan Data Rata-Rata dalam 5 Tahun Terakhir (2015-2019)

\*()= Peringkat Nasional

\*\*[]= nilai indikator

Sumber: BPS, DJPK, diolah.

## 4.6 Maluku-Papua

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa region Maluku-Papua memiliki indikator Politik Keamanan paling rendah. Dari indikator IDI sebesar 0,66 merupakan paling rendah. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi dengan IDI terendah pada peringkat ke 34 dan 33 sebesar 59,80 dan 61,47. Kemudian Maluku Utara dan Maluku berada pada peringkat 29 dan 28 dengan angka sebesar 69,50 dan 73,06.

Sama halnya dengan IDI, region Maluku-Papua memiliki angka terendah untuk indikator penyelesaian tindak pidana sebesar 41,5%. Maluku menjadi provinsi terendah sedangkan Papua, Papua Barat, dan Maluku peringkat ke-32, 29, dan 28.

Begitu juga dengan proporsi korban kejahatan kekerasan, region Maluku-Papua memiliki angka terbanyak dibandingkan region lainnya. Papua Barat dan Papua menjadi provinsi tertinggi secara nasional. Kemudian diikuti oleh Maluku Utara dan Maluku.

**Gambar 8.** Perkembangan Indikator Politik Keamanan dan Perekonomian Per Provinsi di



Region Maluku-Papua Berdasarkan Data Rata-Rata dalam 5 Tahun Terakhir (2015-2019)

\*()= Peringkat Nasional

\*\*[]= nilai indikator

Sumber: BPS, DJPK, diolah.

## Kesimpulan

Berdasarkan peta politik keamanan yang telah ditampilkan dalam referensi ini, dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa daerah yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk dapat ditingkatkan baik dari sisi politik/demokrasinya, maupun keamanannya, terutama pada wilayah timur Indonesia yakni region Maluku-Papua. Perbaikan terhadap indikator politik-keamanan diharapkan juga akan mendorong peningkatan pada variabel perekonomian di daerah tersebut, sehingga perbaikan atas indikator politik-keamanan harus dianggap sebagai hal yang penting.

## Daftar Pustaka

- BPS (2021). Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi. Badan Pusat Statistik. Diunduh dari <https://www.bps.go.id/indicator/34/598/1/indeks-demokrasi-indonesia-idi-menurut-provinsi.html>
- BPS (2021). Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa). Badan Pusat Statistik. Diunduh dari <https://www.bps.go.id/indicator/12/1886/1/jumlah-penduduk-hasil-proyeksi-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin.html>
- BPS (2021). PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (2010=100) (Juta Rupiah). Badan Pusat Statistik. Diunduh dari <https://www.bps.go.id/indicator/171/533/1/pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-pengeluaran-2010-100-.html>
- BPS (2021). Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (Persen). Badan Pusat Statistik. Diunduh dari <https://www.bps.go.id/indicator/34/297/1/persentase-penyelesaian-tindak-pidana.html>
- BPS (2021). Proporsi Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan Dalam 12 Bulan Terakhir Menurut Provinsi. Badan Pusat Statistik. Diunduh dari <https://www.bps.go.id/indicator/34/1311/1/proporsi-penduduk-yang-menjadi-korban-kejahatan-kekerasan-dalam-12-bulan-terakhir-menurut-provinsi.html>
- BPS (2021). Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri dan Dalam Negeri Menurut Provinsi 2006-2020. Badan Pusat Statistik. Diunduh dari <https://www.bps.go.id/indicator/13/1840/1/realisasi-investasi-penanaman-modal-luar-negeri-menurut-provinsi.html>
- Chenery, Hollis (1979). *Structural Change and Development Policy*. Oxford University.
- DJPK (2021). Anggaran dan Realisasi APBD. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan: Jakarta. Diunduh dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.
- Esthiningrum (2017). *Pengaruh Demokrasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta: DI Yogyakarta.
- Lemhanas (2016). *Mewujudkan Stabilitas Keamanan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. Lemhanas: Jakarta.
- Saputro (2019). *Analisis Pengaruh Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Industri Strategis Terhadap Makroekonomi*. Universitas Borobudur: Jakarta.
- The Economist Intelligence Unit (2021). *Democracy Index 2015-2020*. Diunduh dari <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2020/>
- TheGlobalEconomy.com (2021). *Indonesia: Security threats index*. TheGlobalEconomy.com. Diunduh dari [https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/security\\_threats\\_index/](https://www.theglobaleconomy.com/Indonesia/security_threats_index/)
- World Bank (2021). *GDP per capita (PPP)*. Diakses dari <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD>







**PUSAT KAJIAN ANGGARAN  
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI**

JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA PUSAT  
TELP. (021) 5715635 - FAX (021) 5715635

[HTTP://www.puskajianggaran.dpr.go.id](http://www.puskajianggaran.dpr.go.id)

 [puskajianggaran](https://www.instagram.com/puskajianggaran)

EMAIL: [puskaji.anggaran@dpr.go.id](mailto:puskaji.anggaran@dpr.go.id)